Submitted: 30 October 2026	*Revised: 18 November 2026*	*Accepted: 19 November 2026*

Penguatan Kolaboratif Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan di BKAD Kota Batu

Sri Sulasmiyati

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

***sri_su_fia@ub.ac.id**

Kata Kunci: tata kelola keuangan dan aset daerah; barang milik daerah; administrasi keuangan; KKN Tematik; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 4, 9, 16, 17

Abstrak Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah memerlukan administrasi yang tertib, informasi aset yang andal, serta komunikasi layanan publik yang mudah diakses. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendukung penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah melalui kolaborasi KKN Tematik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu. Kegiatan dilaksanakan pada Juli 2026 melalui identifikasi kebutuhan mitra, observasi, telaah dokumen, survei lapangan, pengembangan luaran, dan evaluasi. Hasil kegiatan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kelompok 66 menghasilkan penataan sebagian arsip SP2D, kajian awal pemanfaatan aset beserta potensi efek pengganda ekonomi, dan tiga draf SOP administrasi keuangan. Sementara itu, kelompok 65 mengembangkan infografis penyewaan aset, video edukasi yang telah dipublikasikan, basis data aset tanah dengan capaian penyelesaian sekitar 97 persen, serta booklet interaktif SI-BUNDA. Ketujuh program tersebut berkontribusi terhadap penguatan dokumentasi administrasi, penyediaan informasi aset, dan pengembangan media edukasi. Namun, dampaknya terhadap efisiensi kerja, pemahaman pengguna, dan peningkatan pendapatan daerah belum diukur. Keberlanjutan program memerlukan validasi data, penerapan prosedur, dan evaluasi pemanfaatan luaran untuk mendukung tata kelola daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Keywords: *local financial and asset governance; regional government assets; financial administration; community engagement; Sustainable Development Goals (SDGs) 4, 9, 16, 17*

Abstract *Strengthening regional financial and asset governance requires orderly administration, reliable asset information, and easily accessible public service communications. This community service activity aims to support the strengthening of regional financial and asset governance through collaboration between the Thematic Community Service Program (KKN) of the Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University, and the Batu City Regional Finance and Asset Agency (BKAD). The activity was implemented in July 2026 through identification of partner needs, observation, document review, field surveys, development of outputs, and evaluation. The results of the activity were analyzed using a descriptive-qualitative approach. Group 66 produced a partial arrangement of SP2D archives, an initial study of asset utilization and potential economic multiplier effects, and three draft SOPs for financial administration. Meanwhile, Group 65 developed an asset leasing infographic, a published educational video, a land asset database with a completion rate of approximately 97 percent, and an interactive booklet, SI-BUNDA. These seven programs contributed to strengthening administrative documentation, providing asset information, and developing educational media. However, their impact on work efficiency, user understanding, and increasing regional revenue has not been measured. Program sustainability requires data validation, implementation of procedures, and evaluation of the utilization of outputs to support accountable regional governance that is oriented towards sustainable development.*

© 2026 JACE. This work is licensed under CC BY-SA 4.0

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tata kelola tersebut tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada keteraturan arsip transaksi, ketepatan informasi aset, konsistensi prosedur kerja, serta kemampuan instansi menyampaikan informasi teknis kepada masyarakat dan pegawai. Kerangka pengelolaan keuangan daerah di Indonesia antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu merupakan mitra Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan dua kelompok mahasiswa yang ditempatkan sesuai kebutuhan mitra, yaitu kelompok 65 pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kelompok 66 pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi (BPA). Berdasarkan hasil koordinasi dan identifikasi permasalahan, kelompok 65 menawarkan solusi berupa pendataan aset tanah, pengembangan infografis dan video edukasi penyewaan aset, serta penyusunan booklet SI-BUNDA. Sementara itu, kelompok 66 berfokus pada penataan arsip SP2D, kajian potensi pemanfaatan aset, dan penyusunan tiga draf SOP administrasi keuangan. Program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mitra terhadap keteraturan administrasi, keandalan informasi aset, dan kemudahan akses informasi layanan.

Ciri pembeda pengabdian ini terletak pada pendekatan kolaboratif yang menghubungkan penguatan administrasi internal, perencanaan dan pemanfaatan aset, serta edukasi layanan publik dalam satu instansi. Berbeda dari kegiatan yang hanya berfokus pada satu aspek administratif atau edukatif, pengabdian ini menghasilkan tujuh luaran yang saling melengkapi untuk mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah. Meskipun dilaksanakan secara paralel, pendekatan tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan informasi dan dokumentasi kerja sebagai dasar penguatan kelembagaan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Menurut kelompok 66, tim mitra menghadapi penumpukan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sekitar 18.000 dokumen per tahun; arsip tahun 2025 belum sepenuhnya tertata. Pada dimensi aset, sekitar 49 bidang properti investasi tercatat dan sebagian belum dikaji secara mendalam; pada tahap pemilihan, 23 bidang disebut sebagai aset belum termanfaatkan dan tiga di antaranya menjadi fokus studi awal. Selain itu, informasi awal mitra mengindikasikan hanya dua dari sekitar 18 prosedur kerja yang telah terdokumentasi dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP). Angka-angka tersebut merepresentasikan kondisi yang dilaporkan oleh mitra dan tim KKN, bukan audit yang dilakukan secara terpisah. Dengan demikian, kelompok 66 mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam tata kelola keuangan dan aset daerah, yaitu belum optimalnya penataan arsip keuangan, terbatasnya standardisasi prosedur kerja melalui SOP, serta belum maksimalnya pendataan dan kajian potensi pemanfaatan aset daerah.

Observasi kelompok 65 menunjukkan persoalan yang berbeda. Informasi mengenai mekanisme sewa aset tanah masih didominasi regulasi serta dokumen administratif yang

tidak mudah dipahami oleh calon penyewa. Staf dan pengguna baru juga membutuhkan panduan operasional yang lebih sederhana mengenai perencanaan kebutuhan BMD dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Barang Milik Daerah (SI-BUNDA). Pada saat yang sama, data administrasi aset perlu dibandingkan dengan kondisi fisik di lapangan agar dokumentasi dan materi komunikasi publik lebih akurat.

Temuan kelompok 65 dan 66 menunjukkan bahwa permasalahan BKAD Kota Batu saling berkaitan antara penguatan administrasi internal dan penyediaan informasi pengelolaan aset daerah. Kelompok 66 mengidentifikasi belum optimalnya penataan arsip keuangan, keterbatasan dokumentasi SOP, serta pendataan dan kajian potensi pemanfaatan aset. Sementara itu, kelompok 65 menemukan perlunya penyederhanaan informasi prosedur sewa aset, penyediaan panduan operasional SI-BUNDA, dan penyesuaian data administratif dengan kondisi fisik aset. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya keterpaduan antara pengelolaan dokumen, standardisasi prosedur kerja, keandalan data aset, dan komunikasi informasi publik. Sejumlah program pengabdian sebelumnya telah membahas digitalisasi arsip pemerintahan (Rakhmad et al., 2024), pendampingan inventarisasi dan pelaporan BMD (Darmawati et al., 2024), pengembangan sistem verifikasi aset (Wisnuadhi et al., 2024), implementasi SIMBADA (Maulidia & Lutfia, 2025), serta edukasi regulasi pengelolaan BMD (Oktavianti et al., 2025). Meskipun demikian, program-program tersebut memiliki fokus intervensi yang berbeda dan belum secara khusus mengintegrasikan aspek administrasi keuangan, pengelolaan aset, dan komunikasi informasi publik dalam konteks BKAD Kota Batu.

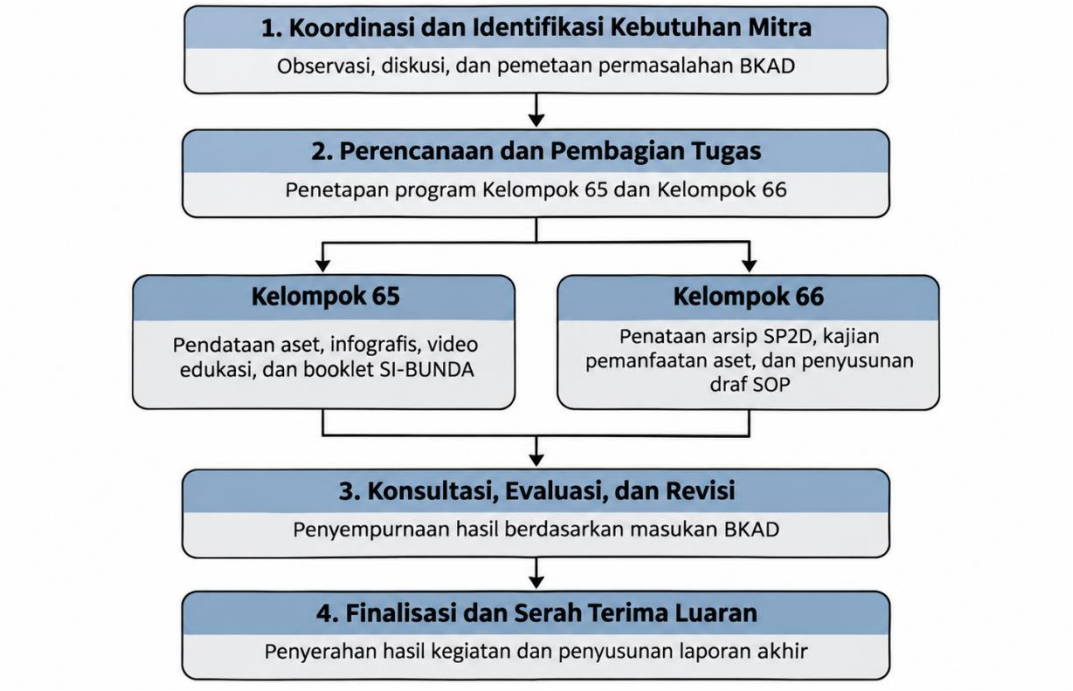
Berdasarkan permasalahan dan kajian terdahulu tersebut, kebaruan praktis program pengabdian ini terletak pada pendekatan kolaboratif lintasbidang yang mengintegrasikan dua sisi tata kelola dalam satu instansi, yaitu penguatan administrasi internal (*back-office*) melalui penataan arsip SP2D, penyusunan draf SOP, serta pendataan dan kajian awal potensi pemanfaatan aset; dan penguatan komunikasi layanan serta edukasi internal (*front-office* dan dukungan operasional) melalui pengembangan basis data aset, infografis, video edukasi, dan booklet interaktif SI-BUNDA. Integrasi tersebut diarahkan untuk mendukung tertib administrasi, meningkatkan kemudahan akses informasi, dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan serta aset daerah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan memaparkan metode pelaksanaan, hasil dan luaran yang dihasilkan, keterkaitan antarluaran, serta keterbatasan evaluasi dan rekomendasi keberlanjutan program.

2. METODE

Program berlangsung di lingkungan BKAD Kota Batu, Jawa Timur. Kedua kelompok KKN melaksanakan kegiatan selama 1 bulan, yaitu selama bulan Juli 2026. Pengabdian menggunakan pendekatan kolaboratif berbasis kebutuhan mitra; mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dan pegawai unit kerja terkait. Dua kelompok bekerja pada unit berbeda sehingga tujuh program dilaksanakan secara paralel, bukan sebagai satu eksperimen atau intervensi tunggal.

Kegiatan pengabdian melibatkan dosen pembimbing lapangan, mahasiswa KKN Tematik kelompok 65 dan 66 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta pegawai BKAD Kota Batu sebagai mitra. Kompetensi yang dilibatkan mencakup administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset, analisis potensi ekonomi, serta pengembangan media edukasi digital. Kelompok 65 berfokus pada pendataan aset dan pengembangan media informasi, sedangkan kelompok 66 mendukung

administrasi keuangan, penyusunan SOP, dan kajian pemanfaatan aset. Pegawai BKAD berperan memberikan informasi teknis, pendampingan, serta masukan untuk penyempurnaan luaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Tahapan Kegiatan Pengabdian

2.1. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan

Permasalahan awal diidentifikasi melalui koordinasi, observasi, dan konsultasi dengan mitra. Pada kelompok 66, pemetaan kebutuhan diarahkan pada penataan SP2D, pengkajian aset properti investasi, serta alur Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), penggajian dan pelaporan keuangan. Pada kelompok 65, pengumpulan informasi mencakup mekanisme sewa tanah, administrasi dan regulasi BMD, dokumentasi aset, serta kebutuhan pengguna baru SI-BUNDA. Setelah disepakati, program dibagi ke tim atau subkelompok berdasarkan kompetensi dan kapasitas waktu.

2.2. Pelaksanaan kegiatan dan pengembangan luaran

Kegiatan pertama berupa penataan arsip SP2D melalui penyortiran dan penataan fisik dokumen tahun 2025 berdasarkan jenis, nomor, tanggal atau periode penerbitan. Penataan arsip merupakan proses pengorganisasian dan pengelompokan dokumen secara sistematis berdasarkan klasifikasi, jenis, nomor, maupun waktu penerbitan untuk memastikan informasi dapat disimpan, ditemukan kembali, dan digunakan secara efektif. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI, 2018) menjelaskan bahwa pemeliharaan arsip dinamis mencakup pemberkasan, penataan, dan penyimpanan arsip dengan tujuan menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, serta ketersediaan informasi.

Kegiatan kedua dilakukan analisis properti yang dilaksanakan melalui telaah data aset, survei kondisi dan aksesibilitas lokasi, identifikasi alternatif pemanfaatan dan skema kerja sama, serta penelaahan potensi ekonomi. Analisis potensi efek pengganda ekonomi ditambahkan setelah evaluasi mitra pada 15 Juli 2026. *Multiplier effect* atau efek pengganda ekonomi merupakan dampak berantai yang timbul akibat peningkatan aktivitas ekonomi pada suatu sektor dan kemudian memengaruhi aktivitas ekonomi pada

sektor-sektor lainnya. Miller dan Blair (2009) menjelaskan bahwa efek pengganda dapat dianalisis melalui pendekatan input-output untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan permintaan akhir pada suatu sektor memengaruhi output, pendapatan, nilai tambah, dan kesempatan kerja dalam suatu perekonomian. Dampak tersebut dapat berupa dampak langsung (*direct effect*) yang dihasilkan oleh kegiatan utama, dampak tidak langsung (*indirect effect*) melalui keterkaitan dengan sektor penyedia barang dan jasa, serta dampak lanjutan (*induced effect*) yang muncul dari peningkatan konsumsi rumah tangga akibat bertambahnya pendapatan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari suatu investasi tidak hanya terbatas pada kegiatan investasi itu sendiri, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.

Kegiatan ketiga adalah penyusunan draf SOP yang meliputi telaah dasar hukum, pemetaan pelaksana dan alur dokumen, penulisan dalam format mitra, lalu revisi melalui konsultasi berulang. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang memuat tahapan pelaksanaan suatu kegiatan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap proses kerja dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, SOP Administrasi Pemerintahan (SOP AP) menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan prosedur administrasi secara terstandar. SOP berfungsi memperjelas urutan kegiatan, pembagian tanggung jawab, persyaratan dokumen, serta waktu penyelesaian pekerjaan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada kebiasaan kerja individu dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penyusunan SOP juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah agar prosedur kerja selaras dengan ketentuan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kegiatan keempat adalah penyusunan infografis dan pembuatan video edukasi. Infografis merupakan media komunikasi visual yang menggabungkan teks, gambar, simbol, dan elemen grafis untuk menyampaikan informasi secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Dunlap dan Lowenthal (2016) menjelaskan bahwa infografis dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang kompleks dan padat menjadi bentuk visual yang mendukung pemrosesan informasi, pemahaman, serta kemampuan mengingat kembali materi. Sejalan dengan hal tersebut, Charsky (2023) menekankan bahwa pengembangan infografis sebagai media pembelajaran perlu memperhatikan tujuan penyampaian informasi, karakteristik sasaran pengguna, dan pengorganisasian elemen visual agar pesan dapat dipahami secara efektif. Oleh karena itu, penyusunan infografis tidak hanya menekankan aspek estetika, tetapi juga memerlukan ketepatan substansi, pemilihan informasi yang relevan, penggunaan bahasa yang sederhana, dan penyajian alur informasi secara logis.

Dalam konteks pelayanan publik, infografis dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang membantu pemerintah menyampaikan informasi kebijakan, prosedur administrasi, serta layanan kepada masyarakat secara lebih mudah diakses. Dailey et al. (2025), melalui penelitian terhadap 322 infografis yang digunakan pemerintah kota di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa infografis naratif dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi publik, menjelaskan kegiatan pemerintahan, serta mengomunikasikan informasi mengenai perencanaan, evaluasi, dan risiko. Temuan tersebut menunjukkan relevansi infografis sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penyusunan infografis dilakukan oleh kelompok 65, melalui

pengumpulan regulasi, penyederhanaan alur, desain visual dan verifikasi substansi. Video edukasi disusun dari naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, dan persetujuan materi.

Kegiatan selanjutnya adalah pendataan aset. Pendataan aset merupakan kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, dan memperbarui informasi mengenai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendataan aset merupakan bagian dari proses inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan keberadaan dan kondisi fisik aset. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, inventarisasi merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam penatausahaan aset daerah karena menyediakan informasi mengenai identitas, lokasi, luas, nilai, kondisi, serta pemanfaatan aset yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pertanggungjawaban aset pemerintah daerah.

Pendataan aset memiliki peran penting dalam meningkatkan akurasi informasi, efektivitas pengelolaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Nooraini et al. (2022) menjelaskan bahwa inventarisasi aset tetap mencakup aspek fisik dan yuridis, sehingga pengelolaan aset tidak hanya memerlukan pencatatan administratif, tetapi juga verifikasi terhadap keberadaan serta status penguasaannya. Kegiatan ini melibatkan kurasi data sewa, survei kondisi fisik dan lokasi, pencatatan koordinat serta foto, dan verifikasi silang dengan catatan administrasi.

Booklet merupakan media informasi dan pembelajaran berbentuk buku ringkas yang menyajikan materi secara sistematis dengan bahasa sederhana, ilustrasi, dan desain visual yang memudahkan pembaca memahami suatu topik. Fuadiyah dan Wijayanti (2024) menjelaskan bahwa booklet dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran tambahan karena mampu menyajikan informasi secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam konteks organisasi, penyusunan booklet juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan penyebaran pengetahuan kerja. Nonaka (1994) menjelaskan bahwa penciptaan pengetahuan organisasi melibatkan interaksi antara pengetahuan *tacit* (*tacit knowledge*), yaitu pengetahuan yang melekat pada pengalaman individu, dan pengetahuan eksplisit (*explicit knowledge*) yang dapat didokumentasikan serta dibagikan kepada anggota organisasi. Booklet yang disusun oleh kelompok 65 disebut SI-BUNDA yang dikembangkan dengan menelaah regulasi, mengamati proses kerja, menyusun petunjuk langkah demi langkah, serta merangkum pertanyaan pengguna dalam format tanya-jawab.



Gambar 2. Serah Terima Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik

2.3. Monitoring, evaluasi, dan ruang lingkup analisis

Monitoring dilakukan selama penyusunan produk melalui arahan pegawai, diskusi, pemaparan draf, perbaikan dan serah terima. Data artikel bersumber dari dua laporan akhir kegiatan KKN mahasiswa, catatan capaian program dan dokumentasi yang dicantumkan di dalamnya. Analisis dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kegiatan, capaian program, serta permasalahan yang ditemukan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sandelowski (2000) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai suatu fenomena dengan tetap mempertahankan kedekatan antara hasil analisis dan data yang diperoleh. Sejalan dengan hal tersebut, Kim et al. (2017) menyatakan bahwa pendekatan deskriptif-kualitatif memiliki fleksibilitas dalam penggunaan sumber data dan teknik analisis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Analisis bersifat deskriptif-kualitatif ini dilakukan dengan memisahkan antara hasil berupa keluaran yang dapat diverifikasi melalui laporan dan manfaat yang masih berupa harapan atau potensi. Tidak dilaporkan survei literasi sebelum–sesudah, pengukuran waktu pemrosesan, atau realisasi tambahan PAD sebagai akibat program.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Setelah Pemaparan Laporan Akhir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penataan arsip dokumen SP2D: penguatan keterlacakan administrasi

Kegiatan KKN Tematik kelompok 66 di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu difokuskan pada penataan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2025 yang belum sepenuhnya tertata. Kegiatan dilaksanakan melalui penyortiran, pengelompokan, dan penyusunan dokumen berdasarkan jenis, periode, nomor, serta tanggal penerbitan dengan pendampingan petugas pengarsipan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung keteraturan penyimpanan dokumen keuangan daerah sekaligus mempermudah proses identifikasi dokumen yang diperlukan dalam kegiatan administrasi, verifikasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Hasil kegiatan berupa penataan sebagian arsip fisik SP2D sehingga susunan dokumen menjadi lebih sistematis. Meskipun demikian, keseluruhan arsip belum dapat diselesaikan selama periode pengabdian karena besarnya volume dokumen serta keterbatasan waktu, tenaga, dan fasilitas penyimpanan.

Kelompok 66 membantu penataan fisik dokumen SP2D tahun 2025 di BKAD Kota Batu. Kegiatan dilakukan secara bergiliran dengan sekitar tiga anggota per hari pada

pukul 08.00–12.00 WIB dan pendampingan petugas pengarsipan. Dokumen dikelompokkan menurut jenis dan periode, kemudian disusun berdasarkan nomor dan tanggal penerbitan. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penataan arsip dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat keterlacakan administrasi keuangan daerah. Pengorganisasian dokumen berdasarkan klasifikasi yang konsisten berpotensi membantu proses penelusuran dan mengurangi risiko kesalahan dalam penyimpanan maupun pencarian dokumen. Namun, manfaat tersebut belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan efisiensi yang terukur karena kegiatan belum disertai pengukuran waktu pencarian arsip sebelum dan sesudah penataan. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan penyusunan daftar arsip yang terstandar, penerapan sistem klasifikasi secara konsisten, penyediaan sarana penyimpanan yang memadai, serta pengembangan digitalisasi arsip secara bertahap dengan tetap memperhatikan ketentuan keamanan dan akses informasi. Langkah tersebut diperlukan agar hasil penataan tidak hanya memberikan manfaat sementara, tetapi juga menjadi dasar penguatan sistem pengelolaan arsip yang lebih berkelanjutan di BKAD Kota Batu.



Gambar 4. Penataan Arsip Dokumen

Secara teoretis, penataan dokumen SP2D dapat dijelaskan melalui *Records Continuum Model* yang dikembangkan Upward (1996), yang memandang arsip sebagai rekaman aktivitas organisasi yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bukti pertanggungjawaban. Perspektif ini menegaskan bahwa pengelompokan dokumen berdasarkan jenis, periode, nomor, dan tanggal bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga keterlacakan informasi transaksi keuangan. Prinsip tersebut sejalan dengan ISO 15489-1:2016 yang menekankan pentingnya keautentikan, keandalan, integritas, dan keterpakaian arsip. Lebih lanjut, dalam perspektif akuntabilitas publik, Bovens (2007) menjelaskan bahwa organisasi pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang berwenang melakukan pengawasan. Dengan demikian, penataan arsip SP2D yang sistematis dapat dipahami sebagai salah satu prasyarat penguatan akuntabilitas administrasi keuangan daerah karena mendukung ketersediaan bukti transaksi yang dapat ditelusuri dan diverifikasi.

Pentingnya penataan arsip yang sistematis didukung oleh penelitian Azzahra et al. (2023) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelompokan arsip dengan mengombinasikan tanggal dan nomor dokumen dapat memudahkan proses temu kembali arsip. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem klasifikasi dan pengurutan dokumen yang konsisten dapat membantu petugas mengidentifikasi serta menemukan dokumen yang diperlukan.

Dengan demikian, keteraturan arsip memiliki relevansi terhadap kelancaran proses administrasi, terutama pada instansi pemerintah yang mengelola dokumen dalam jumlah besar dan membutuhkan informasi yang dapat ditelusuri kembali.

3.2. Analisis properti investasi: dari inventaris aset ke opsi pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk meningkatkan nilai manfaat aset sekaligus mendukung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satmoko dan Sari (2024) menjelaskan bahwa optimalisasi aset tanah dan bangunan pemerintah daerah memerlukan inventarisasi, pemeriksaan aspek legalitas, penilaian aset, identifikasi alternatif pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pemetaan potensi aset, kompleksitas regulasi, dan belum optimalnya kerja sama pemanfaatan merupakan hambatan dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, pengembangan aset tidak cukup didasarkan pada ketersediaan lahan, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi fisik, kepastian hukum, karakteristik wilayah, potensi ekonomi, serta kesesuaian alternatif pemanfaatannya dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan pendekatan tersebut, KKN Tematik kelompok 66 melakukan kajian awal terhadap tiga aset prioritas BKAD Kota Batu, yaitu tanah hutan produksi di Desa Oro-Oro Ombo, tanah irigasi di Kelurahan Sisir, serta tanah dan bangunan rumah negara tanpa golongan di Kelurahan Sisir. Kajian dilakukan melalui telaah dokumen, survei kondisi fisik dan aksesibilitas, identifikasi potensi ekonomi kawasan, serta penyusunan alternatif pemanfaatan dan skema kerja sama. Hasilnya menunjukkan bahwa tanah hutan produksi di Oro-Oro Ombo berpotensi dikembangkan untuk kegiatan rekreasi dan olahraga, meskipun menghadapi keterbatasan sumber air dan aksesibilitas. Sementara itu, tanah irigasi di Kelurahan Sisir memiliki potensi pemanfaatan untuk kegiatan seni dan budaya. Adapun kajian aset rumah negara tidak dilanjutkan ke tahap analisis dampak ekonomi karena ditemukan persoalan status penguasaan dan ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya verifikasi legalitas dan kondisi aktual aset sebelum penentuan alternatif pemanfaatan.

Pada evaluasi bersama BKAD Kota Batu tanggal 15 Juli 2026, kajian diperluas dengan memasukkan analisis potensi *multiplier effect* atau efek pengganda ekonomi. Miller dan Blair (2009) menjelaskan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi dapat memberikan dampak langsung, tidak langsung, dan lanjutan melalui keterkaitan antarsektor, sedangkan Nuryadin dan Purwiyanta (2023) menunjukkan adanya efek pengganda sektor pariwisata terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan pendekatan tersebut, kelompok 66 mengkaji dua alternatif pemanfaatan, yaitu *Sport Center* dan *Botanical and Spiritual Garden* di Oro-Oro Ombo serta *Art Center* di Kelurahan Sisir. Analisis menggunakan data sekunder dari Kota Batu Dalam Angka 2026 (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2026) untuk menyusun skenario dampak ekonomi melalui pendekatan pengganda Keynesian, meliputi potensi output, pendapatan, kesempatan kerja, serta penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kajian mengidentifikasi peluang berkembangnya sektor pendukung, seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan jasa. Temuan Taupikurrahman dan Suwandana (2022) turut mendukung potensi keterkaitan ekonomi kegiatan olahraga, tetapi karena menggunakan pendekatan *Inter-Regional Input-Output*, hasilnya tidak dapat langsung diterapkan pada Kota Batu. Oleh karena itu, estimasi kelompok 66 perlu dipahami sebagai indikasi potensi ekonomi yang masih memerlukan kajian lanjutan. Hasil kajian kelompok 66 memberikan kontribusi berupa rekomendasi awal pemanfaatan aset yang mempertimbangkan karakteristik lokasi

dan potensi manfaat ekonomi bagi daerah. Meskipun demikian, estimasi efek pengganda yang disusun masih memiliki keterbatasan karena didasarkan pada asumsi dan skenario awal, serta belum menggunakan model *input-output* regional yang terkalibrasi secara khusus untuk perekonomian Kota Batu. Crompton (1995) mengingatkan bahwa analisis dampak ekonomi fasilitas olahraga berisiko menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi apabila tidak memperhatikan kesesuaian koefisien pengganda, batas wilayah analisis, biaya peluang, serta perbedaan antara dampak ekonomi bruto dan tambahan manfaat ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, proyeksi dalam laporan pengabdian perlu dipahami sebagai indikasi potensi, bukan sebagai bukti peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, atau PAD yang telah terealisasi.

Dalam perspektif *Public Value Theory*, Moore (1995) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya publik tidak hanya diukur berdasarkan manfaat finansial, tetapi juga nilai yang dihasilkan bagi masyarakat. Melalui kerangka *Strategic Triangle*, keputusan pengelolaan aset perlu mempertimbangkan tiga aspek, yaitu penciptaan nilai publik, legitimasi dan dukungan kelembagaan, serta kapasitas operasional. Dalam konteks kajian kelompok 66, kerangka ini menunjukkan bahwa alternatif pemanfaatan aset di Oro-Oro Ombo dan Kelurahan Sisir tidak cukup dinilai berdasarkan potensi PAD dan *multiplier effect*, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat sosial, kepastian hukum, dan kelayakan pelaksanaannya. Dengan demikian, optimalisasi aset daerah perlu diarahkan pada keseimbangan antara manfaat ekonomi, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan aset.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset daerah memerlukan pendekatan yang menggabungkan identifikasi potensi ekonomi, verifikasi kondisi dan legalitas aset, serta penilaian alternatif pemanfaatan secara bertahap. Kajian yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi BKAD Kota Batu untuk menentukan prioritas studi lanjutan. Sebelum alternatif pembangunan direalisasikan, diperlukan analisis kelayakan finansial dan ekonomi, kajian kesesuaian tata ruang, penilaian dampak lingkungan dan sosial, verifikasi status hukum aset, serta penetapan skema pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan BMD. Analisis efek pengganda juga perlu dikembangkan menggunakan data investasi dan permintaan yang lebih terukur serta struktur keterkaitan ekonomi regional. Dengan demikian, pemanfaatan aset daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada potensi penerimaan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebermanfaatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara berkelanjutan.

3.3. Penyusunan tiga draf SOP: pembakuan pengetahuan kerja

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang bertujuan memastikan proses administrasi dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 menegaskan pentingnya SOP Administrasi Pemerintahan sebagai instrumen standardisasi proses kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Zidan dan Isbandono (2024) menjelaskan bahwa penyusunan SOP memerlukan identifikasi kebutuhan, pengembangan prosedur, serta evaluasi agar sesuai dengan kondisi operasional instansi.

Dalam kegiatan KKN Tematik kelompok 66, penyusunan SOP dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BKAD Kota Batu. Kegiatan menghasilkan tiga draf SOP, yaitu SOP Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), SOP Pembentukan Daftar Gaji dan Pembayaran Gaji Pegawai, serta SOP Penyusunan Laporan Keuangan. Penyusunan dilakukan melalui identifikasi regulasi, pemetaan alur kerja, penentuan pelaksana, dan konsultasi bersama

pegawai BKAD. Proses tersebut melibatkan beberapa tahapan revisi, khususnya pada SOP Penyusunan Laporan Keuangan, untuk menyesuaikan prosedur tertulis dengan praktik administrasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Silva dan Rosdiana (2025), yang menekankan pentingnya proses evaluasi dan revisi dalam penyusunan SOP agar mampu memperjelas alur serta tanggung jawab kerja.

Dalam perspektif *Organizational Routines Theory*, Feldman dan Pentland (2003) menjelaskan bahwa rutinitas organisasi memiliki dua aspek, yaitu *ostensive* yang menggambarkan pemahaman umum mengenai prosedur kerja dan *performative* yang mencerminkan pelaksanaannya dalam praktik sehari-hari. Perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas SOP tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen tertulis, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan praktik kerja aktual. Dalam konteks BKAD Kota Batu, proses konsultasi dan revisi ketiga draf SOP mencerminkan upaya menyelaraskan prosedur formal dengan kebutuhan operasional pegawai. Dengan demikian, penyusunan SOP merupakan langkah awal pembakuan proses kerja yang perlu dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi agar dapat mendukung konsistensi serta perbaikan administrasi secara berkelanjutan.

Penyusunan SOP juga berkontribusi terhadap dokumentasi dan transfer pengetahuan organisasi. Nonaka (1994) menjelaskan bahwa pengetahuan yang berasal dari pengalaman individu dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang terdokumentasi dan dapat dibagikan. Dalam konteks BKAD Kota Batu, ketiga draf SOP berpotensi menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan prosedur administrasi secara lebih konsisten. Namun, karena dokumen tersebut masih memerlukan pengesahan formal, efektivitas penerapannya belum dapat dinilai. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pengesahan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi berkala agar SOP dapat mendukung penguatan akuntabilitas serta keberlanjutan tata kelola keuangan daerah.

3.4. Pengembangan Infografis dan Video Edukasi Penyewaan Aset

Video edukasi merupakan media komunikasi audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan prosedur secara lebih menarik serta mudah dipahami. Mayer dan Moreno (2003) menjelaskan bahwa penggunaan kombinasi gambar dan informasi verbal yang dirancang secara tepat dapat membantu proses pemahaman serta mengurangi beban kognitif pengguna. Dalam konteks pelayanan publik, Sulistyo et al. (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan Instagram Reels oleh instansi pemerintah dapat menjadi alternatif penyebarluasan informasi layanan yang menyesuaikan perkembangan perilaku komunikasi masyarakat.

Kelompok 65 juga menyusun infografis prosedur penyewaan aset tanah sebagai media informasi publik yang menyajikan sembilan tahapan layanan dan dilengkapi kode QR untuk mempermudah akses informasi. Penyusunan dilakukan melalui identifikasi ketentuan penyewaan, penyederhanaan informasi administratif, perancangan visual, serta konsultasi dengan BKAD Kota Batu. Secara konseptual, pengembangan ini sejalan dengan Charsky (2023), yang menekankan pentingnya pengorganisasian informasi visual agar mudah dipahami, serta Dailey et al. (2025), yang menunjukkan pemanfaatan infografis oleh pemerintah daerah untuk mengomunikasikan informasi publik. Meskipun produk telah diselesaikan, efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman calon penyewa masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, KKN Tematik kelompok 65 mengembangkan video edukasi mengenai tata cara penyewaan aset tanah milik Pemerintah Kota Batu. Dua materi yang semula direncanakan sebagai video terpisah digabungkan menjadi satu video berjudul Tata Cara Sewa dan Katalog Aset Tanah/Bangunan BKAD. Video tersebut

memuat ketentuan umum penyewaan, persyaratan, tahapan permohonan, serta informasi mengenai aset tanah dan bangunan yang dapat disewakan. Penyusunan dilakukan melalui pengumpulan informasi, penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, serta konsultasi dan revisi bersama BKAD Kota Batu. Setelah memperoleh persetujuan, video dipublikasikan melalui akun Instagram resmi BKAD sebagai media edukasi masyarakat.

Dalam perspektif *Media Richness Theory*, Daft dan Lengel (1986) menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh kesesuaian karakteristik media dengan kompleksitas informasi yang disampaikan. Media yang mampu menggabungkan berbagai bentuk penyajian informasi berpotensi mengurangi ambiguitas pesan. Dalam konteks BKAD Kota Batu, penggunaan video edukasi memungkinkan prosedur penyewaan aset yang bersifat administratif dan kompleks disajikan melalui kombinasi narasi, teks, dan visual sehingga berpotensi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, karena video merupakan media komunikasi yang tidak menyediakan umpan balik langsung, penyebaran informasi tersebut perlu dilengkapi dengan saluran konsultasi dan evaluasi pemahaman pengguna agar efektivitas komunikasi publik dapat dinilai secara lebih menyeluruh.

Publikasi video tersebut merupakan bentuk pemanfaatan media digital untuk mendukung penyebarluasan informasi pelayanan publik. Ernungtyas et al. (2024) menemukan bahwa Instagram menjadi salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintah. Temuan ini mendukung relevansi pemilihan Instagram sebagai saluran komunikasi BKAD Kota Batu. Meskipun video telah diproduksi dan dipublikasikan, efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyewaan aset belum diukur. Oleh karena itu, evaluasi lanjutan melalui jangkauan publikasi, keterlibatan pengguna, dan tingkat pemahaman calon penyewa diperlukan untuk menilai manfaat media edukasi secara berkelanjutan.

3.5. Pendataan lapangan dan basis data aset tanah

Inventarisasi aset tanah merupakan bagian penting dari penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk memastikan kesesuaian antara informasi administratif dan kondisi fisik aset. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sebagai dasar tertib administrasi aset daerah. Indratama dan Tumija (2024) menemukan bahwa pengelolaan aset tanah pemerintah daerah masih menghadapi persoalan ketidaklengkapan data dan dokumen pendukung, sehingga memerlukan pembaruan dan verifikasi secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan KKN Tematik, kelompok 65 bekerja sama dengan kelompok 62 melaksanakan pendataan aset tanah milik Pemerintah Kota Batu melalui survei lapangan di wilayah Sisir, Temas, Dadaprejo, Songgokerto, dan Oro-Oro Ombo. Kegiatan meliputi pencocokan data administrasi dengan kondisi fisik, pencatatan lokasi dan titik koordinat, identifikasi penggunaan lahan, serta dokumentasi foto. Hasil kegiatan berupa basis data berbentuk lembar kerja elektronik yang memuat identitas, luas, nilai, lokasi, dan kondisi pemanfaatan aset dengan capaian penyelesaian sekitar 97 persen. Survei juga menemukan beberapa ketidaksesuaian, seperti perbedaan luas bidang, kekeliruan papan identitas aset, dan perubahan pembagian bidang tanah yang belum tercatat dalam data administrasi.

Dalam perspektif *Data Quality Framework*, Wang dan Strong (1996) menjelaskan bahwa kualitas data tidak hanya ditentukan oleh akurasi, tetapi juga mencakup kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, kejelasan penyajian, dan kemudahan akses informasi. Kerangka ini menegaskan bahwa kelengkapan data belum tentu mencerminkan keandalan informasi apabila masih terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya. Dalam konteks BKAD Kota Batu, temuan perbedaan luas bidang, kekeliruan identitas aset, dan

perubahan kondisi lahan menunjukkan pentingnya verifikasi lapangan untuk meningkatkan kualitas basis data aset tanah. Dengan demikian, capaian pendataan sebesar 97 persen perlu dipahami sebagai tingkat penyelesaian pekerjaan, sedangkan kualitas informasi aset tetap memerlukan validasi dan pembaruan berkelanjutan agar dapat mendukung pengambilan keputusan pengelolaan BMD secara tepat.

Hasil tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi lapangan untuk meningkatkan kelengkapan dan keandalan informasi aset daerah. Arnanto et al. (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan informasi spasial dapat mendukung kegiatan inventarisasi dan visualisasi data pertanahan. Dengan demikian, penyusunan basis data yang dilengkapi koordinat dan dokumentasi fisik berpotensi membantu BKAD Kota Batu dalam penelusuran, pemantauan, dan perencanaan pemanfaatan aset. Namun, capaian 97 persen menunjukkan tingkat penyelesaian kegiatan, bukan tingkat akurasi data. Oleh karena itu, diperlukan validasi lanjutan terhadap perbedaan data administratif dan kondisi lapangan, pembaruan informasi secara berkala, serta pengintegrasian data spasial dan administratif agar pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih tertib dan berkelanjutan.

3.6. Booklet interaktif SI-BUNDA untuk edukasi internal

Booklet merupakan media pembelajaran ringkas yang menyajikan informasi secara sistematis melalui kombinasi teks dan ilustrasi. Fuadiyah dan Wijayanti (2024) menunjukkan bahwa booklet dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran tambahan karena penyajian informasinya yang ringkas dan mudah dipahami. Dalam konteks organisasi, Nonaka (1994) menjelaskan bahwa pengetahuan berdasarkan pengalaman individu (tacit knowledge) dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang terdokumentasi dan dapat dibagikan. Dengan demikian, booklet berpotensi menjadi sarana dokumentasi dan transfer pengetahuan untuk mendukung pembelajaran internal organisasi.

KKN Tematik kelompok 65 mengembangkan Booklet Interaktif Perencanaan Barang Milik Daerah sebagai panduan bagi pegawai baru dan mahasiswa magang di BKAD Kota Batu. Booklet berukuran A5 sebanyak 20 halaman ini memuat pengenalan Barang Milik Daerah (BMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), prinsip perencanaan kebutuhan, petunjuk penggunaan aplikasi SI-BUNDA, glosarium, serta pertanyaan yang sering diajukan (frequently asked questions). Penyusunan dilakukan melalui pengumpulan informasi, pengamatan proses kerja, perancangan materi, konsultasi, dan revisi bersama mitra. Produk akhir diselesaikan dalam bentuk digital dan cetak serta diserahkan kepada BKAD sebagai media pendukung edukasi internal.

Dalam perspektif *Cognitive Load Theory*, Sweller (1988) menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas memori kerja perlu diperhatikan dalam penyusunan materi pembelajaran agar informasi dapat diproses secara efektif. Dalam konteks BKAD Kota Batu, penyajian materi perencanaan BMD dan penggunaan SI-BUNDA melalui teks ringkas, ilustrasi, glosarium, serta pertanyaan yang sering diajukan berpotensi mengurangi kompleksitas informasi bagi pegawai baru dan mahasiswa magang. Dengan demikian, booklet interaktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi pengetahuan organisasi, tetapi juga sebagai media pembelajaran mandiri yang dapat membantu pengguna memahami prosedur administratif secara bertahap. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Kegiatan ini berlangsung pada 13–27 Juli 2026 dan melibatkan pengumpulan data dari BKAD, penulisan, desain, pemaparan, revisi, dan finalisasi. Hasil akhir tersedia sebagai e-book dan buku cetak dengan capaian penyelesaian yang dilaporkan 100%.

Penyerahan buku cetak dilaksanakan pada kegiatan pelepasan KKN-T. Booklet ini merupakan bentuk pembakuan pengetahuan tacit pengguna menjadi panduan eksplisit yang berpotensi membantu orientasi kerja; frekuensi kesalahan input sesudah penggunaan belum diukur.



Gambar 5. Proses Finalisasi dan Konsultasi Booklet dengan BKAD Kota Batu

3.7. Sintesis lintas program, capaian, dan agenda keberlanjutan

Secara keseluruhan, tujuh program dapat dibaca sebagai tiga kelompok intervensi yang saling memperkuat. Pertama, penguatan proses internal melalui arsip dan SOP. Kedua, penguatan kualitas informasi aset melalui analisis pemanfaatan dan verifikasi basis data. Ketiga, penyebaran pengetahuan melalui infografis, video dan booklet. Integrasi ini penting karena informasi publik yang mudah dipahami membutuhkan data aset yang benar, sedangkan penggunaan data internal membutuhkan prosedur dan dokumentasi yang konsisten.

Hasil KKN tematik kedua kelompok memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah memerlukan dukungan pada tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu keteraturan proses administratif, keandalan informasi aset, dan penyampaian informasi kepada pengguna layanan. Penataan arsip dan penyusunan draf SOP menjadi langkah awal untuk memperkuat dokumentasi serta konsistensi proses internal. Kajian pemanfaatan dan pendataan aset memberikan informasi pendukung bagi perencanaan dan pengambilan keputusan, sedangkan infografis, video edukasi, dan booklet membantu menerjemahkan informasi teknis menjadi media yang lebih mudah digunakan oleh masyarakat maupun pegawai. Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan bukan terletak pada satu luaran tertentu, melainkan pada kesalingmelengkapan berbagai bentuk dukungan administratif dan informasional dalam satu instansi pemerintah daerah. Meskipun demikian, keterkaitan konseptual antarluaran tersebut belum menunjukkan adanya integrasi operasional ataupun peningkatan kinerja organisasi yang terukur.

Tabel 1. Ringkasan Luaran Tujuh Program KKN Tematik Kelompok 65 dan 66 di BKAD Kota Batu.

Kelompok dan program	Luaran yang dilaporkan	Status atau catatan
66 – Penataan SP2D	Sebagian arsip fisik SP2D 2025 tertata	Belum tuntas seluruh arsip
66 – Analisis properti	Kajian tiga aset prioritas dan skenario efek pengganda	Rekomendasi, bukan realisasi PAD
66 – SOP	Tiga draf SOP diserahkan	Perlu pengesahan formal
65 – Infografis	Panduan sewa sembilan tahap dan QR	Final dan diserahkan; bukti dua kanal perlu cek
65 – Video edukasi	Satu video sewa dan katalog aset	Dilaporkan terbit di Instagram BKAD
65 – Basis data aset	Spreadsheet lokasi, nilai, luas, koordinat dan foto	Sekitar 97%; validasi lanjutan
65 – Booklet SI-BUNDA	Buku A5, 20 halaman, digital dan cetak	Diserahkan untuk edukasi internal

Sumber: Data penelitian bersumber dari dua dokumen internal yang tidak diterbitkan, yaitu Laporan Akhir KKN-T kelompok 65 dan kelompok 66 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2026), serta dokumentasi kegiatan yang tercantum dalam kedua laporan tersebut. Angka persentase menunjukkan capaian pelaksanaan menurut laporan, bukan hasil pengukuran dampak pengguna.

Kontribusi kegiatan pengabdian terhadap agenda pembangunan berkelanjutan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh United Nations (2015), khususnya SDG 16 melalui penguatan tata kelola kelembagaan dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta SDG 17 melalui kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Pengembangan media edukasi berkaitan dengan SDG 4, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi mendukung orientasi SDG 9. Selain itu, kajian potensi pemanfaatan aset daerah memiliki keterkaitan dengan SDG 8 melalui peluang pengembangan aktivitas ekonomi lokal. Namun, kontribusi tersebut masih terbatas pada luaran kegiatan dan potensi manfaatnya, sehingga belum dapat dinyatakan sebagai pencapaian indikator SDGs yang terukur secara empiris.

Keterbatasan utama mencakup durasi kegiatan pendek, jumlah dokumen arsip yang besar, perubahan lingkup analisis properti pada tengah pelaksanaan, perbedaan data aset dengan kondisi lapangan, dan kebutuhan revisi berulang pada produk administratif. Dua laporan tidak menyediakan desain evaluasi dampak, sampel pengguna, atau indikator kuantitatif sebelum–sesudah. Evaluasi lanjutan sebaiknya menggunakan waktu temu arsip, tingkat kelengkapan dokumen permohonan sewa, pemahaman pengguna media, tingkat koreksi data aset, kepatuhan SOP, dan utilisasi booklet secara berkala.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan KKN Tematik kelompok 65 dan 66 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di BKAD Kota Batu menghasilkan tujuh program pengabdian yang saling melengkapi dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah. Kelompok 66 berkontribusi melalui penataan sebagian arsip SP2D, penyusunan kajian awal pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan tiga draf SOP administrasi keuangan. Sementara itu, kelompok 65 menghasilkan infografis prosedur penyewaan aset, video

edukasi yang telah dipublikasikan, basis data hasil pendataan aset tanah dengan capaian sekitar 97 persen, serta booklet interaktif SI-BUNDA. Secara keseluruhan, luaran tersebut menunjukkan kontribusi pengabdian dalam memperkuat dokumentasi administrasi, menyediakan informasi pendukung perencanaan dan pemanfaatan aset, serta mengembangkan media edukasi bagi masyarakat dan pegawai.

Meskipun seluruh program menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi mitra, dampaknya terhadap efisiensi administrasi, pemahaman pengguna, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum diukur secara empiris. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan memerlukan penyelesaian penataan arsip, validasi data aset, pengesahan dan penerapan SOP, pengembangan kajian kelayakan pemanfaatan aset, serta evaluasi efektivitas media edukasi. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini menjadi langkah awal dalam mendukung penguatan kelembagaan yang akuntabel, peningkatan kualitas informasi publik, dan pemanfaatan aset daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 16 dan SDG 17.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Jajaran Pimpinan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui Hibah Strategis KKN FIA 2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu Jawa Timur, seluruh mahasiswa anggota kelompok 65 dan 66, serta pihak yang membantu terlaksananya kegiatan ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arnanto, A., Wahyuni, Prasetyo, P. K., Wulansari, H., & Mujiati. (2024). Cloud GIS: Desain pemanfaatan teknologi spasial untuk inventarisasi data dan informasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Kadaster: *Journal of Land Information Technology*, *2*(2), 105–118. https://doi.org/10.31292/kadaster.v2i2.36

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2018). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis.

Azzahra, N., Cicih, S., & Romaddyniah, L. (2023). Peran pengelompokkan dan penataan arsip untuk efisiensi sistem temu kembali arsip pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, *7*(2), 190–199. https://doi.org/10.17977/um008v7i22023p190-199

Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2026). *Kota Batu dalam angka 2026.* https://batukota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/61013bb5ba7945fbe2230be4/kota-batu-dalam-angka-2026.html

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Charsky, D. (2023). Infographics for learning and instruction. *Journal of Visual Literacy*, *42*(2), 130–145. https://doi.org/10.1080/1051144X.2023.2216115

Crompton, J. L. (1995). Economic impact analysis of sports facilities and events: Eleven sources of misapplication. *Journal of Sport Management, 9*(1), 14–35. https://doi.org/10.1123/jsm.9.1.14

Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. *Management Science, 32*(5), 554–571. https://doi.org/10.1287/mnsc.32.5.554

Dailey, S., Gilmore, B., & Rangarajan, N. (2025). The visualization of public information: Describing the use of narrative infographics by U.S. municipal governments. *Public Policy and Administration, 40*(1), 3–26. https://doi.org/10.1177/09520767221140954

Darmawati, D., Kusumawati, A., Syamsuddin, S., Indrijawati, A., & Juanda, I. S. K. (2024). Pendampingan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah dalam upaya menciptakan laporan keuangan berkualitas di Kabupaten Pinrang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(4), 858–867. https://doi.org/10.37478/abdika.v4i4.5006

Dunlap, J. C., & Lowenthal, P. R. (2016). Getting graphic about infographics: Design lessons learned from popular infographics. *Journal of Visual Literacy, 35*(1), 42–59. https://doi.org/10.1080/1051144X.2016.1205832

Ernungtyas, N. F., Irwansyah, Boer, R. F., & Qadrifa, S. S. (2024). Exploring the utilization of government social media as an information source. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 28*(2). https://doi.org/10.17933/jskm.2024.5419

Feldman, M. S., & Pentland, B. T. (2003). Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change. *Administrative Science Quarterly, 48*(1), 94–118. https://doi.org/10.2307/3556620

Fuadiyah, A., & Wijayanti, E. (2024). Meta-analisis validitas pengembangan booklet sebagai salah satu suplemen bahan ajar dalam materi pembelajaran biologi SMA/MA. Bio-Pedagogi: *Jurnal Pembelajaran Biologi, 13*(2), 57–62. https://doi.org/10.20961/bio-pedagogi.v13i2.87866

Indratama, A. Y., & Tumija. (2024). Optimalisasi penatausahaan aset tetap tanah tahun 2022 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Birokrasi, 6*(1). https://doi.org/10.33701/jmb.v6i1.4148

International Organization for Standardization. (2016). *Information and documentation—Records management—Part 1: Concepts and principles (ISO Standard No. 15489-1:2016).* https://www.iso.org/standard/62542.html

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/190079/Permendagri%20Nomor%2047%20Tahun%202021.pdf

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in Nursing & Health, 40*(1), 23–42. https://doi.org/10.1002/nur.21768

Maulidia, & Lutfia, C. (2025). Implementasi SIMBADA melalui program MBKM untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset di pemerintahan daerah. *JDISTIRA: Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat, 5*(2), 416–423. https://doi.org/10.58794/jdt.v5i2.1575

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist, 38*(1), 43–52. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-output analysis: Foundations and extensions (2nd ed.)*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511626982

Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.

Nooraini, A., Mamulak, C. D. R., & Sinurat, M. (2022). Pengelolaan aset tetap dalam mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2*(1), 1–11. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2442

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science, 5*(1), 14–37. https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14

Nuryadin, D., & Purwiyanta, P. (2023). Multiplier effects of tourism sector in Yogyakarta: Input-output analysis. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 16*(1), 170–183. https://doi.org/10.15294/jejak.v16i1.40054

Oktavianti, R. G., Hadiyanto, I. P., Muqsith, A., & Oktafianto, A. (2025). Sinergi pemerintah daerah dan akademisi dalam penyusunan perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Kabupaten Situbondo. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian, 5*(1), 95–113. https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7345

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Rakhmad, A. A. N., Nanda, H. I., Merlinda, S., & Munir, S. (2024). Transformasi digital Kantor Desa Wonokerso Kabupaten Malang untuk memperkuat administrasi dan mewujudkan SDGs 11. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(4), 77–86. https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1237

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health, 23*(4), 334–340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G

Satmoko, R. A., & Sari, A. G. P. (2024). Optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4*(2), 148–159. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4665

Silva, N. N., & Rosdiana, W. (2025). Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik di Kelurahan Tambaksari. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan, 3*(2). https://doi.org/10.26740/inovant.v3i2.40582

Sulistyo, M. F., Sukmajatnika, D. Z., & Syaputra, R. (2024). Using Instagram Reels as a media for government public service information. *PERSPEKTIF, 13*(1), 212–220. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10574

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Taupikurrahman, & Suwandana, E. (2022). Analisis sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dampak MotoGP Mandalika. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 16*(2), 78–100. https://doi.org/10.47608/jki.v16i22022.78-100

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. https://sdgs.un.org/2030agenda

Upward, F. (1996). Structuring the records continuum part one: Post-custodial principles and properties. *Archives & Manuscripts, 24*(2), 268–285. https://publications.archivists.org.au/index.php/asa/article/view/8583

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems, 12*(4), 5–33. https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099

Wisnuadhi, B., Munawar, G., Alifi, M. R., Arsyad, Z., & Wirasta, W. (2024). Pengembangan dan pelatihan modul verifikasi BMD pada aplikasi DIARVIS-BMD di Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSIQ, 11*(1), 65–70. https://doi.org/10.32699/ppkm.v11i01.5844

Zidan, D., & Isbandono, P. (2024). Analisis penyusunan standar operasional prosedur di Inspektorat Provinsi Jawa Timur (studi kasus pada DSOP). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan, 2*(2). https://doi.org/10.26740/inovant.v2i2.34067